

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693100/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 09 Maret 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
- Sebesar : Rp. 1.481.256.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.481.256.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 1.481.256.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

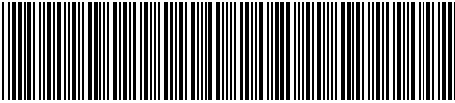
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026

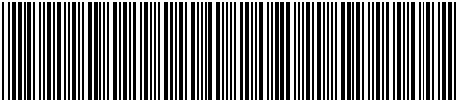


DS:1204-9056-0235-0192

Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	24.682.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	24.682.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.456.574.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.456.574.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
I A. INFORMASI KINERJA

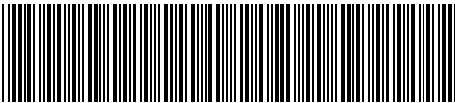


DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi						24.682.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah						24.682.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.682.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah				1.00	Rekomendasi Kebijakan	24.682.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						1.456.574.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah						1.456.574.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				9,00	Lembaga	38.430.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah				9.00	Lembaga	38.430.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				300,00	Orang	43.771.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah				300.00	Orang	43.771.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				22,00	Lembaga	18.047.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah				22.00	Lembaga	18.047.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik				1,00	dokumen, Peta, Data	10.881.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah				1.00	Data	10.881.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1204-9056-0235-0192

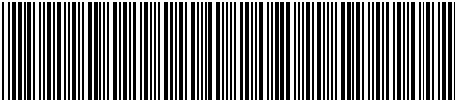
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		218,00	Orang	1.090.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	218.00	Orang	1.090.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		25,00	Kelompok Masyarakat	199.250.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	25.00	Kelompok Masyarakat	199.250.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	56.195.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan	(PN)	1.00	Lembaga	56.195.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
I B. SUMBER DANA



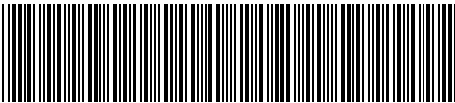
DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.481.256.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.481.256.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



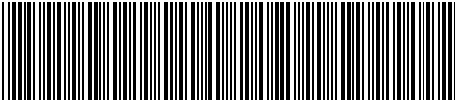
DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693100	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU	-	1.481.256	-	-	-	1.481.256	09 . 00	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	24.682	-	-	-	24.682		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	24.682	-	-	-	24.682		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (09.00 RIAU / RIAU)	-	24.682	-	-	-	24.682		
01	RM	-	24.682	-	-	-	24.682		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.456.574	-	-	-	1.456.574		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.456.574	-	-	-	1.456.574		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	38.430	-	-	-	38.430		
01	RM	-	38.430	-	-	-	38.430		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	43.771	-	-	-	43.771		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

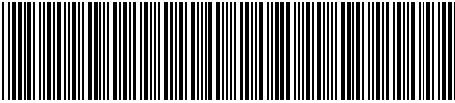


DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	43.771	-	-	-	43.771	008	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	18.047	-	-	-	18.047	09 . 51	
01 RM		-	18.047	-	-	-	18.047	008	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	10.881	-	-	-	10.881	09 . 51	
01 RM		-	10.881	-	-	-	10.881	008	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (09.00 RIAU / RIAU)	-	1.090.000	-	-	-	1.090.000	09 . 00	
01 RM		-	1.090.000	-	-	-	1.090.000	008	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (09.00 RIAU / RIAU)	-	199.250	-	-	-	199.250	09 . 00	
01 RM		-	199.250	-	-	-	199.250	008	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
Kewenangan : (KD)

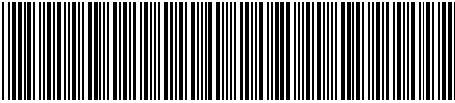
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (09.51 RIAU / KOTA PEKANBARU)	-	56.195	-	-	-	56.195	09 . 51	
	01 RM	-	56.195	-	-	-	56.195	008	
JUMLAH		-	1.481.256	-	-	-	1.481.256		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (693100) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

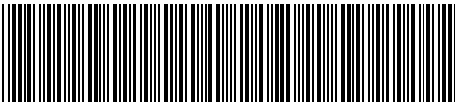
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693100	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	11.648	212.378	127.365	192.188	212.331	184.841	158.505	149.647	116.075	116.278	0	1.481.256
		BELANJA BARANG	0	11.648	212.378	127.365	192.188	212.331	184.841	158.505	149.647	116.075	116.278	0	1.481.256
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	1.000	1.000	3.257	1.000	0	10.000	8.425	0	0	0	24.682
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	1.000	1.000	3.257	1.000	0	10.000	8.425	0	0	0	24.682
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	11.648	211.378	126.365	188.931	211.331	184.841	148.505	141.222	116.075	116.278	0	1.456.574
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	11.648	211.378	126.365	188.931	211.331	184.841	148.505	141.222	116.075	116.278	0	1.456.574

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
IV A. B L O K I R



DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [693100] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

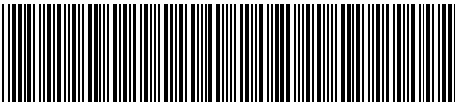
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693100/2026
IV B. C A T A T A N



DS:1204-9056-0235-0192

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [693100] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001